

ABSTRAK

Lailatul Masrurah, Implikasi Hukum Dinasti Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Probolinggo Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Dinasti politik marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Probolinggo yang telah terjadi sejak 18 Tahun lalu, dimana dimulai oleh Hasan Aminuddin sebagai Kepala Daerah dua periode lalu dilanjutkan oleh istrinya Puput Tantriana Sari yang menjadi Bupati selama dua periode kembali. Dinasti politik yang terjadi memberikan banyak dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk juga berbagai implikasi yang dihasilkan oleh sebuah praktik dinasti politik. Korupsi menjadi salah satu bentuk implikasi yang banyak ditimbulkan oleh praktik tersebut, padahal dalam Undang-Undang sudah ditetapkan bahwa sebagai penyelenggaraan negara harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis implikasi dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo baik implikasi hukum maupun implikasi non-hukum. Kedua, untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Probolinggo dalam menyikapi implikasi dinasti politik.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan sebagai *grand theory*, otonomi daerah sebagai *middle theory*, *good governance* dan teori konflik kepentingan sebagai *applied theory* sehingga dapat mengetahui implikasi hukum yang terjadi dari praktik dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang berkaitan dengan implikasi hukum dinasti politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pertama, praktik dinasti politik tersebut ternyata menimbulkan berbagai implikasi dan salah satunya ialah dampak dari aspek hukum yaitu Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjerat Bupati Probolinggo non-aktif selain itu dinasti politik juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesejahteraan masyarakat Probolinggo. Kedua, pemerintah Probolinggo melakukan beberapa tindak lanjut untuk menyikapi implikasi yang ditimbulkan oleh dinasti politik tersebut dengan cara melaksanakan optimalisasi terhadap pengawasan dan *check and balances* dalam tiga kekuasaan sehingga tidak terjadi lagi penyelewangan kekuasaan di daerah Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Dinasti Politik, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, KKN.

ABSTRAK

Lailatul Masrurah, Legal Implications of Political Dynasties in the Implementation of Local Government In Probolinggo Regency Are Connected With Law Nomor 28 of 1999 Concerning the Implementation of a Clean State and Free From Corruption, Collusion, and Nepotism.

Political dynasties are rife in various regions in Indonesia, especially in Probolinggo Regency, which has occurred since 18 years ago. The political dynasty that occur have many impacts on the implementation of government in the regions, including various implications produced by dynastic political practice. Corruption is one of the implications that many of these practices have, even though the law has stipulated that the state must be clean and free from sin, collusion, and nepotism as an administrator.

First, this study aims to analyze the practice of political dynasties in the implementation of government in the Probolinggo Regency and to explore the implications of political dynasties in government performance in Probolinggo Regency, both legal and non-legal implications. Second, to analyze the follow-up carried out by the local government in Probolinggo Regency in responding to the impact of political dynasties.

The framework of thought in the research on the legal implications of political dynasties in the implementation of regional government is based on the theory of the welfare state, regional autonomy, good governance, and conflict of interest theory so that it can find out the legal implications that occur from the practice of political dynasties in the implementation of regional government.

The research method used is a descriptive method of analysis, namely by collecting, studying, analyzing, and interpreting and presenting data related to the legal implications of political dynasties in the implementation of local government in Probolinggo Regency, using an empirical juridical approach, in contrast, the type of research used in research is qualitative research.

The results of this study are First, the political dynasty occurred for 18 years and stopped after the Regent of Probolinggo was caught in a hand-catching operation at the end of 2021, the political dynasty that occurred did not have a good impact on society, and even the welfare of the people of Probolinggo has not been fulfilled as evidenced by the high level of poverty and the practice of political dynasties turned out to have various implications. One of them was the impact of legal aspects, namely Gratification and money laundering crimes that ensnared the regent of Probolinggo. Second, the Probolinggo government carried out several follow-ups to respond to the implications posed by the political dynasty by optimizing supervision and checks and balances in the three powers so that there would be no more abuse of power in the Probolinggo Regency area.

Kata Kunci: Political Dynasty, Regional Government Administration, KKN.